

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Daerah Penyangga Justru Lebih Bagus

Dewan Kritik Pemprov Tidak Tepat Sasaran Salurkan Bansos

JAKARTA-Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menyebut pembagian bantuan sosial (bansos) yang diserahkan Pemprov DKI Jakarta tidak tepat sasaran dan terkesan asal-asalan. Bansos itu diberikan selama kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sebab dari fakta yang ditemukan di lapangan, banyak warga yang memiliki mobil justru mendapat bansos, sementara warga rentan miskin tak menerimanya. "Di Dapil saya RW 08, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pembagiannya tidak merata. Ada lansia ibu-ibu yang sangat perlu bantuan justru tidak terdaftar, tapi warga yang punya mobil malah terdaftar sebagai penerima," kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan saat dihubungi pada Kamis (16/4/2020).

Menurutnya, DKI harus mengevaluasi daftar penerima bantuan tersebut secepatnya. Apalagi bantuan itu terus bergulir sejak Kamis (9/4/2020) sampai Kamis (23/4/2020) mendatang. Seharusnya, kata dia, DKI mencontoh mekanisme pemberian bansos yang ada di Kota Tangerang.

Pemerintah daerah setempat memberikan bantuan tersebut dengan melibatkan perangkat RT dan RW sebab mereka dianggap yang paling tahu soal latar belakang ekonomi warganya. "Bayangkan, daerah penyangga (Kota Tangerang) yang baru akan melakukan PSBB dalam hal pemberian bansos ini justru



Ada lansia ibu-ibu yang sangat perlu bantuan justru tidak terdaftar, tapi warga yang punya mobil malah terdaftar sebagai penerima."

Judistira Hermawan
Sekretaris Fraksi Golkar
DPRD DKI Jakarta

lebih bagus mekanismenya. Mereka itu datanya bottom-up (pendataan dari masyarakat), jadi minta RT dan RW mendata, kemudian diserahkan ke Dinas Sosial untuk disetujui Wali Kota," ujar Judistira.

Atas persoalan ini, Judistira akan mempertanyakan basis data yang dipakai DKI dalam menyalurkan bansos kepada masyarakat berkategori miskin dan rentan miskin di ibu kota. Hal itu perlu dilakukan agar bansos yang diserahkan tepat sasaran kepada orang yang membutuhkan.

"Ini yang akan kami tanyakan ke Dinas Sosial karena mereka yang memiliki data penerima bansos," jelasnya. Pemprov DKI memberikan bansos kepada warga yang terdampak kebijakan PSBB di ibu kota. Kebijakan PSBB dilakukan untuk menekan potensi penyebaran virus corona (Covid-19).

Untuk bansos yang diberikan itu berupa beras 5 kg satu karung, sarden dua kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter, biskuit dua bungkus, serta masker kain dua helai, dan sabun mandi dua batang.

Rincian nilai paket bansos yang diterima warga DKI ini sebesar Rp149.500 dan rencan akan dibagikan kepada 1,25 juta kepala keluarga (KK).

Cabut Izin

Di lain sisi, Judistira meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegur hingga mencabut izin perusahaan yang masih beroperasi saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Perusahaan-perusahaan yang harus ditegur dan dicabut izinnya adalah perusahaan yang tidak dikecualikan saat PSBB di ibu kota. Meski demikian, sebelum mencabut izin perusahaan bersangkutan, Pemprov harus memberi surat teguran terlebih dahulu.

"Cabut (izin). Tapi tentu harus ada peringatan tertulis, pertama kemudian ini kan keadaannya darurat tidak mungkin beri peringatan sampai tiga kali, kalau beri peringatan pertama tapi tidak mengikuti aturan PSBB langsung cabut izin," ujarnya. Menurut dia, sejumlah perusahaan masih beroperasi meski tidak dikecualikan bisa jadi karena aturan PSBB belum tersosialisasi dengan baik. Imbasnya, PSBB tidak berjalan secara efektif dan sesuai tujuannya.

"Banyak juga dunia usaha yang keliatannya belum tersosialisasi dengan baik. Masih banyak orang datang bekerja, kita lihat di kereta api, stasiun. Kemudian di jalan-jalan ini juga semakin banyak mobil dan

motor. Nah ini kan ada satu indikasi yang rupanya PSBB ini belum dapat berjalan dengan maksimal," jelasnya.

Untuk diketahui, PSBB di Jakarta berlangsung mulai hari ini, Jumat (10/4/2020) dan berakhir pada 23 April 2020 mendatang. Namun, ada sejumlah sektor usaha yang tetap berjalan selama masa PSBB, antara lain : Sektor kesehatan. Rumah sakit, klinik, dan industri kesehatan, seperti produsen dan disinfektan tetap beroperasi

Sektor pangan, yakni yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Sektor energi terkait dengan air, gas, listrik, dan pompa bensin. Sektor komunikasi, yakni jasa komunikasi maupun media komunikasi. Sektor keuangan dan perbankan, termasuk pasar modal, tetap diizinkan beroperasi. Sektor logistik yang terkait dengan distribusi barang akan tetap berjalan seperti biasa.

Sektor perhotelan, sektor konstruksi, sektor industri strategis, sektor pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu. Sektor kebutuhan sehari-hari, seperti ritel, warung, dan toko kelontong yang menjual kebutuhan warga juga tetap beroperasi.

Namun, belakangan diketahui ada sekitar 200 perusahaan yang mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian untuk tetap beroperasi selama PSBB diterapkan. Rata-rata perusahaan yang diberi izin adalah perusahaan manufaktur besar yang seharusnya tutup saat PSBB. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Andri Yansah pun tidak mengerti alasan Kemenperin menerbitkan izin untuk perusahaan-

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Daerah Penyangga Justru Lebih Bagus

perusahaan tersebut.

Sebab, Kemenperin tidak berkoordinasi dengan Pemprov DKI saat menerbitkan izin itu. Andri meminta Kemenperin mengevaluasi izin perusahaan-perusahaan tersebut. "Saya bersurat kepada Kementerian untuk melakukan evaluasi," tutur Andri.

Sering Terlewat

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani, meminta pembagian bantuan sosial (bansos) berupa sembako dengan target 1,1 juta orang oleh Pemprov DKI Jakarta, jangan sampai melewatkan golongan rentan miskin.

Menurut politisi PAN ini, kelompok masyarakat tersebut harus diperhatikan karena kategori ini sering terlewat oleh pemerintah. "Sosialisasinya harus jelas. Kapan bantuan bakal datang, lalu orang yang akan menerima sudah ada datanya di RW. Jadi, datanya jadi mutakhir. Orang yang benar-benar butuh bisa lapor. Jadi, tidak ada yang terlewat. Kan ada kelompok yang situasi ekonomi berubah sedikit langsung miskin, biasa disebut rentan miskin, ini yang jumlahnya sangat besar. Yang butuh harus dapat," kata Zita di Jakarta, Kamis (16/4/2020).

Kendati demikian, secara khusus Zita mengapresiasi langkah cepat dari Pemprov DKI Jakarta yang menurutnya dapat langsung mengurangi beban di masyarakat. "Kami sudah bicara ini dari awal. Respon Pemprov dan pak Anies Baswedan sangat tepat dan cepat. Saya merasa kepemimpinan yang memiliki sense of crisis. Semoga warga dapat menikmati, masalah pun bisa berkurang. Saya yakin ini tidak akan menyelesaikan, paling

tidak sedikit membantu," kata Zita.

Dirinya mengaku sudah mengelilingi beberapa daerah di Jakarta dan memiliki beberapa masukan penting untuk disampaikan langsung kepada Anies. "Ide yang baik tentu harus ditopang dengan teknis distribusi yang baik, berikut beberapa masukan saya. Pertama, prosedur pembagian harus mengedepankan prinsip jarak fisik dan sosial. Saya lihat pembagian bantuan di beberapa titik membuat kerumunan baru. Nanti, yang tidak sakit bertemu sama yang sakit, kita kan tidak tahu," tuturnya.

Selain itu, Zita menekankan paket bantuan itu harus benar-benar sehat, tidak hanya makanan instan saja. "Kemarin masih ada biskuit atau makanan instan, bisa diganti dengan sayuran, bawang, ayam/daging, tahu, tempe, sehingga lebih sehat," ungkapnya.

Hingga kemarin, Kamis (16/4/2020) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat kasus positif penyakit yang disebabkan virus corona jenis baru di Indonesia sebanyak 5.136 kasus, dengan 446 pasien sembuh dan 469 orang meninggal dunia. Di Jakarta sendiri, sebanyak 202 orang dinyatakan telah sembuh, dari total 2.670 orang kasus positif, dengan jumlah pasien meninggal sebanyak 248 orang, kemudian 1.601 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 619 orang melakukan isolasi mandiri di rumah.

Orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 3.040 orang (2.456 sudah selesai dipantau dan 584 masih dipantau) dan pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 2.456 orang (1.298 sudah pulang dari perawatan dan 1.167 masih dirawat). (dni/ant)